

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi, tentunya memiliki keunggulan tersendiri dibidang pengambilan kebijakan yang mengacu pada aspirasi masyarakat seperti masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah negara yang menganut sistem demokrasi memiliki peran yang sangat penting, salah satu peran masyarakat dalam suatu negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik di pemerintahan pusat maupun didaerah.

Salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu) (Arifin, 2015:109). Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

Pemilihan umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang terlaksana secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu kegiatan yang dapat dimanfaatkan masyarakat yang memiliki kesadaran politik dengan menyalurkan partisipasi politiknya untuk memilih pemimpin negara, karena menggunakan hak pilih pada saat pemilihan umum merupakan hak setiap warga negara yang harus di salurkan karena dapat menentukan pemimpin negara untuk beberapa tahun

mendatang. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat sangat penting dan sangat diharapkan. Surbakti (2010:184), mengatakan bahwa kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

Tinggi rendahnya kesadaran politik masyarakat tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti yang diungkapkan oleh Mu'is (dalam Fatwa, 2016:1618) salah satu faktor yang mempengaruhi kesadaran politik seseorang adalah tingkat pendidikan. G. Almont (1984:70) juga menyatakan bahwa tingkat pendidikan berkaitan erat dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik individu, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kesadaran politiknya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka semakin rendah pula kesadaran politiknya. Handayani (2017:491) mengatakan bahwa tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang ditempuh dengan proses jangka panjang serta didalamnya terdapat prosedur yang terorganisir dan sistematis.

Salah satu wujud dari kesadaran politik masyarakat Indonesia adalah dengan menyalurkan hak suaranya pada pemilihan umum tahun 2019 yang telah diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019. Seperti yang diungkapkan oleh Budiardjo (2008:369) bahwa partisipasi seseorang dalam pemilihan umum menggambarkan kesadaran politik orang tersebut karena semakin sadar seseorang bahwa dirinya dipimpin maka seseorang akan menuntut untuk diberikan hak untuk bersuara dalam pemerintahan. Berdasarkan hasil dilapangan menunjukkan bahwa

masih terdapat daerah dengan kesadaran politik masyarakatnya yang masih rendah seperti yang terjadi di desa yang terletak di Kecamatan Kumpeh Ulu seperti data pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kecamatan Kumpeh Ulu.

No	Desa/Kelurahan	Pengguna Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih		Jumlah Data Pemilih (orang)
		Jumlah (orang)	%	Jumlah (orang)	%	
1	Pemunduran	834	89%	101	11%	935
2	Sipin Teluk Duren	1185	89%	146	11%	1331
3	Ramin	1135	88%	155	12%	1290
4	Kasang Kota Karang	1094	87%	163	13%	1257
5	Lopak Alai	763	87%	111	13%	874
6	Sakean	964	87%	148	13%	1112
7	Solok	1309	87%	203	13%	1512
8	Kasang Lopak Alai	1459	86%	233	14%	1692
9	Sumber Jaya	941	86%	148	14%	1089
10	Sungai Terap	1137	85%	196	15%	1333
11	Teluk Raya	1223	85%	219	15%	1442
12	Kasang Pudak	9474	81%	2235	19%	11709
13	Arang Arang	1149	81%	270	19%	1419
14	Pudak	3178	76%	986	24%	4164
15	Tarikan	1765	76%	546	24%	2311
16	Kota Karang	1128	74%	388	26%	1516
17	Kasang Kumpeh	2338	65%	1237	35%	3575
18	Muara Kumpeh	2337	61%	1464	39%	3801

Sumber: KPU 2019

Berdasarkan data pada tabel diatas, terlihat jelas bahwa dari 18 Desa yang ada di Kecamatan Kumpeh Ulu, Desa Muara Kumpeh memiliki tingkat persentase partisipasi paling rendah dibandingkan dengan desa lainnya yaitu dari 3801 jiwa yang terdaftar dalam data pemilih, hanya 2337 masyarakat Desa Muara Kumpeh yang menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 atau sebesar 61%, sementara sisanya yaitu sebesar 39% masyarakat Desa Muara Kumpeh tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.

Tabel Kategori partisipasi politik

No	Persentase (%)	Kategori
1	81 - 100	Tinggi
2	78 - 80	Sedang
3	1 - 77	Rendah

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa partisipasi politik sebesar 61% masuk dalam kategori rendah dan hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran politik yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Muara Kumpeh yang di lihat dari hasil pemilu.

Pada hari Senin tanggal 22 Juli 2019 pukul 10.00 WIB peneliti melakukan observasi di Kantor Desa Muara Kumpeh untuk mendapatkan data tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Kumpeh seperti pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Muara Kumpeh.

No	Tingkat Pendidikan	Jalur Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Sekolah	Tidak Sekolah	52	1%
2	Tamat Pendidikan Dasar	Sekolah Dasar (SD)	1635	69%
		Sekolah Menengah Pertama (SMP)	993	
		Jumlah	2628	
3	Tamat Pendidikan Menengah	Sekolah Menengah Pertama (SMA)	1016	27%
4	Tamat Pendidikan Tinggi	Diploma III (D3)	42	3%
		Strata I (S1)	51	
		Strata 2 (S2)	12	
		Jumlah	105	
JUMLAH KESELURUHAN			3801	100%

Sumber: Kantor Desa Muara Kumpeh.

Berdasarkan tabel 1.2 tingkat pendidikan diatas menunjukkan secara jelas bahwa sebesar 1% masyarakat Desa Muara Kumpeh tidak sekolah yaitu 52 jiwa, Tamat Pendidikan Dasar yang terdiri dari tamatan SD dan SMP yaitu sebesar 69% atau sebesar 2628 jiwa, tamatan Pendidikan menengah sebesar 27% atau sebesar 1016, dan hanya 3% masyarakat Desa Muara Kumpeh yang melanjutkan

pendidikannya ke Perguruan tinggi yaitu berjumlah 105 jiwa yang terdiri dari D3 sebanyak 42 jiwa, S1 51 jiwa, dan S2 12 jiwa.

Tabel Kriteria tafsiran persentase

No	Persentase (%)	Kategori
1	89 – 100	Sangat tinggi
2	60 – 88	Tinggi
3	41 – 59	Sedang
4	12 – 40	Rendah
5	< 12	Sangat rendah

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa tamatan pendidikan tinggi yang hanya 3% masuk dalam kategori sangat rendah dan tamatan pendidikan menengah sebesar 27% masuk dalam kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya pendidikan masyarakat Desa Muara Kumpeh.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan diatas bahwa tingkat pendidikan berkaitan erat dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik individu, semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kesadaran politiknya. Demikian juga sebaliknya, semakin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka semakin rendah pula kesadaran politiknya. Berdasarkan fenomena yang telah ditemukan, maka peneliti tertarik untuk melakukan pembuktian kepada masyarakat di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu untuk melakukan penelitian dengan judul **“pengaruh tingkat pendidikan pemilih terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh pada pemilu 2019”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu :

1. Kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh rendah, karena tingkat persentase partisipasi masyarakat pada pemilu hanya mencapai 61% yaitu dari 3801 jiwa yang terdaftar dalam data pemilih, hanya 2337 jiwa atau masyarakat yang menggunakan hak pilihnya
2. Masih ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 sebesar 39% yaitu sebesar 1464 jiwa
3. Tingginya jumlah masyarakat yang hanya tamatan Pendidikan dasar sebesar 69% atau sebesar 2648 jiwa dari 3801 jiwa.

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Kesadaran politik masyarakat, seperti pengetahuan politik, pemahaman politik, sikap terhadap politik, dan pola perilaku (tindakan) mengenai politik.
2. Pada tingkat pendidikan dibatasi pada tingkat pendidikan formal yaitu tingkat pendidikan dasar, tingkat pendidikan menengah dan tingkat pendidikan tinggi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah di atas maka permasalahan ini dapat di rumuskan dalam penelitian ini adalah:

1. Berapa jumlah persentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Kumpeh pada saat pemilu 2019?
2. Berapa jumlah persentase kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh pada saat pemilu 2019?

3. Apakah terdapat pengaruh tingkat pendidikan pemilih terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh pada pemilu 2019 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah, dan rumusan masalah diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jumlah persentase tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Kumpeh pada saat pemilu 2019.
2. Untuk mengetahui jumlah persentase kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh pada saat pemilu 2019.
3. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan pemilih terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh pada pemilu 2019.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

secara teoritis penelitian ini berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran pengembangan konsep dan teori kajian ilmiah kepada peneliti-peneliti yang lain yang ingin melakukan penelitian yang sama atau ingin lebih mengembangkan penelitian ini. penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan perbandingan, pertimbangan, dan perkembangan bagi penelitian yang sama atau sejenisnya di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Mahasiswa

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu, pengetahuan dan wawasan bagi mahasiswa tentang demokrasi di Indonesia dalam kaitannya dengan tingkat pendidikan pemilih terhadap kesadaran politik masyarakat dalam pemilu 2019.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini kiranya bisa menjadi masukan bagi pemerintah daerah Desa Muara Kumpeh dan Komisi Pemilihan Umum dalam rangka membangun dan meningkatkan Kesadaran politik masyarakat dalam proses politik pemilihan umum untuk menjadikan pemerintahan yang kuat dan berkualitas.

c. Bagi Program Studi PPkn

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menyumbang pemikiran untuk menambah kajian ilmu maupun referensi bagi Program Studi PPKn.

1.7 Definisi Operasional

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian di atas maka definisi operasional ini adalah

a. Kesadaran politik

Kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan

masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

b. Tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan adalah jenjang pendidikan yang di tempuh dengan proses jangka panjang serta didalamnya terdapat prosedur yang terorganisir dan sistematis. Dalam penelitian ini peneliti menetapkan pada tingkat pendidikan formal yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II KAJIAN TEORETIK

2.1 Kesadaran Politik

2.1.1 Pengertian Kesadaran Politik

Menurut Surbakti (2010 :184) kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Menurut Ruslan (2000:94) kesadaran politik merupakan berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, dan nilai-nilai yang membentuk wawasan politik individu, tinjauan dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.

Menurut Fatwa (2016:1618) kesadaran politik merupakan kondisi tanggap mengerti tentang hal yang mencakup wawasan/pengetahuan politik, nilai-nilai dan orientasi politik, yang memungkinkan seseorang untuk mengerti situasi, kondisi problematika masyarakat, memecahkannya, memberikan keputusan dan menentukan pendirian terhadapnya, yang mendorong untuk dalam rangka merubah atau mengembangkannya. Dari teori definisi kesadaran politik yang telah di paparkan di atas sehingga dapat didefinisikan bahwa kesadaran politik adalah kesadaran akan hak dan kewajiban seseorang dalam berpolitik yang ada di sekitar tempat tinggal ia hidup dan kesadaran tersebut terbentuk dari adanya pengetahuan dan wawasan politik seseorang.

2.1.2 Unsur-Unsur Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000:417) di dalam kesadaran politik mencakup unsur-unsur yang meliputi antaranya yaitu:

- 1) Kesadaran islam yaitu tentang konsepsi secara benar dan menyeluruh yang dengannya secara individu mampu menyikapi realita yang terjadi dengan segala aspek-aspeknya sesuai pandangan intelektual yang telah terbentuk pada dirinya. Dalam hal ini kesadaran didasarkan pada pandangan hidup seseorang dengan kata lain sesuai dengan keyakinan setiap orang. Jadi, pada dasarnya kesadaran islam dalam pengertian ini yaitu kesadaran dalam konsep islam, namun demikian bukan berarti seseorang selain agama islam tidak berarti tidak memiliki kesadaran politik, karena hal tersebut didasarkan pada keyakinan pandangan hidup masing-masing.
- 2) Kesadaran gerakan yaitu kesadaran untuk membentuk organisasi atau gerakan yang bekerja guna mewujudkan cita-cita bersama, tergabung dan terlibat disana dengan berupaya memberikan kontribusi maksimal bagi perkembangan organisasi atau gerakan tersebut.
- 3) Kesadaran akan problematika politik yang terjadi di masyarakatnya, meliputi kesadaran akan masalah, hukum islam, kebesaran dan keterjajahan, kebebasan politik, masalah persatuan dan sebagainya.
- 4) Kesadaran akan hakikat sikap politik yaitu kesadaran akan substansi sekitar sikap politik dimana individu menjadi sadar akan peristiwa atau masalah politik itu sendiri. Termasuk diantaranya adalah mempelajari masalah-masalah politik umum, mempelajari arus politik yang terjadi dan menentukan

sikap terhadapnya, dan memonitor peristiwa-peristiwa politik yang sedang berkembang.

2.1.3 Cara-Cara Mencapai Kesadaran Politik

Menurut Ruslan (2000:96) ada beberapa cara dalam mencapai kesadaran politik yang melalui beberapa hal yaitu:

- 1) Arahan politik secara langsung, baik melalui jalur formal maupun non formal, melalui penjelasan-penjelasan politik, usaha-usaha bimbingan, dan pengajaran pendidikan politik langsung, yaitu dilakukan oleh para pemikir dan pemimpin politik.
- 2) Pengalaman politik yang didapatkan dari partisipasi politik.
- 3) Kesadaran yang muncul dari beberapa secara sendiri, misalnya membaca koran dan buku-buku tentang politik, serta mengikuti berbagai peristiwa.
- 4) Kesadaran yang lahir melalui dialog-dialog kritis.
- 5) Ditambah dengan kesadaran politik yang merupakan hasil dari dua metode, yaitu *apprenticeship* dan generalisasi. Maka seluruh metode ini akan mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesadaran politik.

2.1.4 Faktor-Faktor Kesadaran Politik

Kesadaran politik dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti menurut Ruslan (2000:97-98) faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran politik adalah :

1. Jenis kultur politik dimana individu itu tumbuh darinya/dengan kata lain, tabiat kepribadian politik yang terbentuk darinya.
2. Berbagai revolusi dari perubahan budaya yang terjadi di masyarakat.

3. Tingkat pendidikan, berbagai kemampuan dan kecakapan khusus yang dimiliki individu.
4. Adanya pemimpin politik, sejumlah tokoh politik yang genius yang mampu memberikan arahan politik kepada masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dikatakan faktor-faktor tersebut mempunyai peranan dalam mempengaruhi dan menumbuhkan kesadaran politik seseorang. Faktor-faktor ini pula dapat dijadikan sebagai sebuah acuan dalam mempengaruhi kesadaran politik seseorang. Kemudian menurut Almond (1984 :70) tingkat pendidikan berkaitan erat dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik individu. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kesadaran politiknya, demikian juga sebaliknya makin rendah tingkat pendidikannya, semakin rendah pula tingkat kesadaran politiknya.

2.1.5 Indikator Kesadaran politik

Untuk mengukur tinggi rendahnya kesadaran politik individu, maka diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai patokan atau acuan pengukuran seperti menurut Soekanto (dalam Hidayat, 2016:566) terdapat indikator kesadaran politik yaitu sebagai berikut:

1. Pengetahuan mengenai politik

Hal ini adalah merupakan hasil dari proses mengingat sesuatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang tahu harus mendefinisikan materi atau objek tertentu seperti pengetahuan akan tujuan dari ikut berpartisipasi politik, mengetahui tujuan dari diselenggarakannya pemilu dan mengetahui peraturan tentang pelaksanaan pemilu.

2. Pemahaman tentang politik

Ini merupakan kemampuan menjelaskan mengenai suatu objek seperti politik dan pemilu yang di ketahui secara benar dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar, seperti memahami betapa pentingnya ikut serta dalam berpartisipasi politik, paham akan nilai-nilai demokrasi dalam pemilu, dan paham bahwa politik akan menjadi pemersatu masyarakat, berbangsa dan bernegara.

3. Sikap terhadap fenomena politik

Kesediaan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab tentang kegiatan berpolitik seperti sikap menolak uang suap dalam pemilu, sikap menjaga kejujuran pada saat pemilu dan sikap percaya terhadap lembaga penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu.

4. Pola perilaku terhadap situasi politik

Pola perilaku ini merupakan sesuatu yang dilakukan atau perbuatan mengenai kegiatan berpartisipasi politik seperti datang ke tps untuk memberikan hak suara, ikut berkampanye, dan mencari informasi-informasi politik.

2.2 Tingkat Pendidikan

2.2.1 Pengertian Tingkat Pendidikan

Mudyahardjo (dalam Triwiyanto, 2014:22), memberikan pengertian pendidikan ke dalam tiga jangkauan, yaitu pengertian pendidikan maha luas, sempit dan luas terbatas. Definisi maha luas yaitu pendidikan adalah hidup. Pendidikan adalah segala pengalaman belajar yang berlangsung dalam segala lingkungan dan

sepanjang hidup. Pendidikan adalah segala situasi yang memengaruhi pertumbuhan individu. Definisi sempit, yaitu pendidikan adalah sekolah. Pendidikan adalah pengajaran yang di selenggarakan di sekolah sebagai lembaga pendidikan formal. Pendidikan adalah segala pengaruh yang di upayakan sekolah terhadap anak dan remaja yang diserahkan kepadanya agar mempunyai kemampuan yang sempurna dan kesadaran penuh terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka.

Definisi luas terbatas, yaitu pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran dan/atau latihan yang berlangsung di sekolah dan diluar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peran dalam berbagai lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Pendidikan adalah pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu, agar di kemudian hari dapat memainkan peran hidup secara tepat (Triwiyanto, 2014:23).

Sementara itu, lebih jauh lagi Muhadjir di dalam (Triwiyanto, 2014:23) menunjukkan beberapa istilah yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam bahasa Romawi didapati istilah *educate* yang berarti membawa keluar (sesuatu yang ada didalam). Dalam bahasa Jerman dijumpai istilah *ziehen* yang artinya menarik (lawan dari mendorong). Dalam bahasa Jerman pendidikan disaling dengan istilah *erziehung*, yang berarti menarik keluar atau mengeluarkan. Orang Belanda menggunakan istilah *opvoeden* untuk pendidikan. *Voeden* berarti memberi makan, sedangkan *opveoden* diartikan orang sebagai membesarkan atau mendewasakan. Orang Inggris

menggunakan istilah *to educate* yang diartikan sebagai *to give moral dan intellectual training*. Orang Jawa membedakan antara dasar dan ajar, yang pertama dibawa sejak lahir, sementara yang kedua merupakan hasil pembinaan.

Menurut Saidah (2016:210) tingkat pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam menjalankan pengalaman belajar untuk mempersiapkan individu agar dapat memainkan perannya didalam masyarakat yang di laksanakan secara berjenjang dalam pendidikan formal seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Selanjutnya, menurut Andriyus (2013:26) tingkat pendidikan merupakan salah satu penentu partisipasi politik individu atau kelompok dalam sistem pemilu. Kemudian hal tersebut sejalan dengan pendapat Nofitra (2016:3) yang menjelaskan pendidikan yang tinggi sangat berpengaruh dalam memberikan informasi-informasi tentang politik, serta bisa mengembangkan sebuah kecakapan dalam menganalisa dan menciptakan minat serta kemampuan berpolitik.

1.5.1 Tujuan Pendidikan

Menurut UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas (dalam Danim 2013:41), Bahwa pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Secara akademik, pendidikan memiliki beberapa tujuan. *Pertama*, mengoptimasi potensi kognitif, afektif, dan psikomotor yang dimiliki oleh individu. *Kedua*, mewariskan nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi untuk menghindari

sebisa mungkin individu tercabut dari akar budaya dan kehidupan berbangsa dan bernegara. *Ketiga*, mengembangkan daya adaptabilitas siswa untuk menghadapi situasi masa depan yang terus berubah, baik intensitas maupun persyaratan yang diperlukan sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Keempat, meningkatkan dan mengembangkan tanggung jawab moral siswa, berupa kemampuan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dengan spirit atau keyakinan untuk memilih dan menegakkannya. *Kelima*, mendorong dan membantu individu mengembangkan sikap bertanggungjawab terhadap kehidupan pribadi dan sosialnya, serta memberikan kontribusi dalam aneka bentuk secara seluasnya kepada masyarakat. *Keenam*, mendorong dan membantu individu memahami hubungan yang seimbang antara hukum dan kebebasan pribadi dan sosial.

Ketujuh, mendorong dan mengembangkan rasa harga diri, kemandirian hidup, kejujuran dalam berkerja, dan integritas. *Kedelapan*, mendorong dan mengembangkan kemampuan individu untuk melanjutkan studi, termasuk merangsang minat gemar belajar demi pengembangan pribadi. *Kesembilan*, mendorong dan mengembangkan dimensi fisik, mental, dan disiplin bagi individu untuk menghadapi dinamika kerja yang serba menuntut persyaratan fisik dan ketepatan waktu. *Kesepuluh*, mengembangkan proses berpikir secara teratur pada diri individu. *Kesebelas*, mengembangkan kapasitas diri sebagai makhluk Tuhan yang akan menjadi penebar amanah dimuka bumi ini (Danim 2013:41-42).

1.5.2 Fungsi Pendidikan

Suardi (2010:7) menyatakan bahwa fungsi pendidikan adalah menghilangkan penderitaan rakyat dari kebodohan dan keteringgalan. Diasumsikan bahwa orang

yang berpendidikan akan terhindari dari kebodohan, karena dengan modal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan, orang akan mampu mengatasi berbagai problema kehidupan yang dihadapinya.

Suardi (2010:7) juga menegaskan bahwa kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang tentu sesuai dengan tingkat pendidikan yang diikutinya. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka diasumsikan semakin tinggi pengetahuan, keterampilan, dan kemampuannya. Hal ini menggambarkan bahwa fungsi pendidikan dapat meningkatkan kesejahteraan, karena orang yang berpendidikan dapat terhindar dari kebodohan maupun kemiskinan. Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa fungsi pendidikan adalah membimbing individu kearah tujuan yang kita nilai tinggi.

1.5.3 Jalur dan Jenjang Pendidikan

Menurut UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab VI, terdapat tiga macam jalur pendidikan, yaitu jalur formal, jalur nonformal dan jalur informal. Menurut (Saidah, 2016:211) Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Jalur ini dipakai sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Jalur pendidikan nonformal meliputi pendidikan:

1. Kecakapan hidup
2. Pendidikan anak usia dini
3. Pendidikan kepemudaan
4. Pendidikan pemberdayaan perempuan

5. Pendidikan keaksaraan
6. Pendidikan keterampilan
7. Pelatihan kerja
8. Pendidikan kesetaraan
9. Serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dibawah satuan pendidikan yang berupa lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis.

Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan, yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan (Saidah, 2016:211). Kemudian menurut UU RI No. 2 Tahun 1989 Bab I, pasal 1 ayat 5 menyatakan bahwa, jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman bahan pengajaran (Tirtarahardja, 2005: 264). Jalur pendidikan formal memiliki tiga jenjang pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah, yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)

atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi, yang merupakan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan dokter yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas (Saidah, 2016:211).

Menurut Tirtarahardja, (2005:265) jenjang pendidikan terdiri atas tiga yaitu pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

1. Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Disamping itu juga berfungsi mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Oleh karena itu pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bersifat dasar dan tiap-tiap warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. UU RI No. 2 tahun 1989 menyatakan dasar dan wajib belajar pada pasal 14 ayat 1 bahwa, “warga negara yang berumur 6 tahun berhak mengikuti pendidikan dasar”, dan ayat 2 menyatakan bahwa, “warga negara yang berumur 7 tahun berkewajiban mengikuti pendidikan dasar atau pendidikan yang setara sampai tamat.” Dalam pengertian setara ini termasuk juga pendidikan luar biasa (PLB), pendidikan keagamaan dan/atau pendidikan luar sekolah.

2. Jenjang Pendidikan menengah

Pendidikan menengah yang lamanya tiga tahun sesudah pendidikan dasar, diselenggarakan di SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) atau satuan pendidikan yang sederajat. Pendidikan menengah dalam hubungan ke bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan keatas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum, pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan menengah luar biasa, pendidikan menengah kedinasan dan pendidikan menengah keagamaan.

3. Jenjang pendidikan tinggi

Pendidikan tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah, yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut lembaga pendidikan tinggi melaksanakan misi “Tridharma” pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam ruang lingkup tanah air Indonesia sebagai kesatuan wilayah pendidikan nasional.

Pendidikan tinggi juga berfungsi sebagai jembatan antara pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional dengan perkembangan internasional. Untuk itu dengan tujuan kepentingan nasional, pendidikan tinggi secara terbuka dan selektif mengikuti perkembangan kebudayaan yang terjadi di luar Indonesia untuk diambil manfaatnya bagi pengembangan bangsa dan kebudayaan nasional. Untuk dapat

mencapai tujuan dan kebebasan akademik, melaksanakan misinya, pada lembaga pendidikan tinggi berlaku kebebasan mimbar akademik serta otonomi keilmuan dan otonomi dalam pengetahuan lembaganya. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas (Tirtarahardja, 2005: 266).

2.2.5 Indikator Tingkat Pendidikan

Untuk mengukur pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik seseorang, maka diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai acuan pengukuran tingkat pendidikan. Menurut (Saidah, 2016:210) indikator tingkat pendidikan yang digunakan adalah jenjang pendidikan yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberikan bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar (Tirtarahardja, 2005:265). Pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat (Saidah, 2016:211).

2. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat (Saidah, 2016:211). Pendidikan menengah dalam hubungan ke

bawah berfungsi sebagai lanjutan dan perluasan pendidikan dasar, dan dalam hubungan keatas mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan tinggi ataupun memasuki lapangan kerja (Tirtarahardja, 2005:265).

3. Pendidikan Tinggi.

Pendidikan tinggi, yang merupakan jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah, mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan dokter yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut atau universitas (Saidah, 2016.211).

2.3 Pemilihan Umum (Pemilu)

2.3.1 Pengertian Pemilihan Umum

Pemilihan umum disebut juga dengan “Political Market” (Dr. Indria Samego). Artinya bahwa pemilihan umum adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (Perjanjian Masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa cetak, audio (Radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti, spanduk, pamflet, selebaran bahkan komunikasi antar pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau lobby yang berisi penyampain pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta

pemilihan umum untuk mewakilinya dalam badan legislatif maupun eksekutif (Rahman, 2013:147).

Pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Sejalan dengan pengertian tersebut, pemilihan umum merupakan upaya untuk mewujudkan sila ke-4 dari Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan (Marsono, 1996:ix). Secara konseptual, Ibnu Tricahyono (dalam Labolo, 2015:50-51) mendefinisikan pemilu dengan sudut pandang yang abstrak dan filosofis. Ibnu menyatakan bahwa pemilihan umum merupakan instrumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang bermaksud membentuk pemerintahan yang absah serta sarana mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan rakyat. Kemudian, secara teknik operasional Umaruddin Masdar yang mengartikan pemilu dari sudut pandang teknis pelaksanaannya. Beliau mengungkapkan bahwa pemilu adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih wakil-wakil rakyat.

2.3.2 Tujuan Pemilihan Umum

Tujuan pemilihan umum yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2003, tentang pemilihan umum DPR, DPD, dan DPRD adalah, “pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Adapun tujuan pemilihan umum menurut undang-undang No. 23, tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yaitu, “Pemilu Presiden Dan Wakil

Presiden diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih Presiden Dan Wakil Presiden yang memperoleh dukungan yang kuat dari rakyat sehingga mampu menjalankan fungsi-fungsi kekuasaan pemerintah negara dalam rangka tercapainya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Ramlan Surbakti (dalam Labolo, 2015:55-56) menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu. Pertama, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum dalam demokrasi. Kedua, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. Ketiga, pemilu merupakan sarana memobilisasikan/menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

2.3.3 Asas Pemilihan Umum

Menurut Rahman (2013:149-150) mengenai asas pemilihan umum di Indonesia dikenal ada beberapa asas pemilu yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang berlaku di Indonesia. Asas-asas pemilu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas pemilu menurut UU No. 12 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dalam UU No. 12 /2003, asas pemilihan umum meliputi:

a. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)

c. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

d. Rahasia

Artinya rakyat memilih di jamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perilaku yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2. Asas pemilu menurut UU No. 23 tahun 2003, tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, dalam UU No. 23 /2003, asas pemilihan umum meliputi:

a. Langsung

Artinya rakyat pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara.

b. Umum

Artinya semua WN yang telah berusia 17 tahun atau telah menikah berhak untuk ikut memilih dan telah berusia 21 tahun berhak di pilih dengan tanpa ada diskriminasi (pengecualian)

c. Bebas

Artinya rakyat pemilih berhak memilih menurut hati nuraninya tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun/dengan apapun.

d. Rahasia

Artinya rakyat memilih di jamin oleh peraturan tidak akan diketahui oleh pihak siapapun dan dengan jalan apapun siapa yang dipilihnya atau kepada siapa suaranya diberikan (*secret ballot*).

e. Jujur

Dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pelaksanaan, pemerintah dan partai politik peserta pemilu, pengawas dan pemantau pemilu, termasuk pemilih, serta semua pihak yang terlibat secara tidak langsung, harus bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Adil

Dalam penyelenggaraan pemilu setiap pemilihan dan partai politik peserta pemilu mendapat perilaku yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

2.3.4 Sistem pemilu

Karakteristik negara yang menganut sistem politik demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun demikian sistem pemilihan umum negara demokrasi tidak sama disemua negara. Hal ini ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan model demokrasi yang diterapkannya. Secara garis besar sistem pemilu dapat di bagi dua, yaitu sistem proporsional dan sistem nonproporsional yang di kenal juga dengan sebutan sistem distrik. Di beberapa negara berkembang varian-varian dari kedua sistem itu, yaitu mencoba mengawinkan antara sistem proporsional dengan sistem distrik (Arifin,2015:109).

Secara umum dapat disebutkan bahwa pemilihan umum sistem proporsional menunjukan kepada pertarungan antara partai politik dalam sebuah daerah pemilihan yang luas untuk mencari beberapa orang wakil (*multi-member constituency*). Partai politik mencalonkan banyak kandidat dalam sebuah daftar dengan nomor urut dan rakyat tidak perlu memilih nama orang, tetapi cukup dengan memilih tanda gambar partai politik yang terdaftar sebagai kontestan. Suara yang diperoleh setiap kontestan (partai politik) dihitung, kemudian setiap kontestan akan memperoleh jumlah kursi secara proporsional dengan suara yang diperoleh. Kandidat yang terpilih mewakili

daerah itu ditetapkan berdasarkan nomor urut dari atas ke bawah. Dalam hal ini tidak ada suara pemilih yang hilang (Arifin,2015:110).

Kelemahan dari sistem ini adalah kandidat yang memiliki tidak terpilih karena namanya dalam daftar calon, berada pada urutan bawah, sedang calon yang ada di urutan atas adalah justru kandidat yang kurang dikenal. Sistem ini memang memperkuat kedudukan kepemimpinan partai yang menyusun daftar calon. Namun demikian, sistem proporsional memiliki juga kelebihan antara lain karena di anggap representatif, yaitu jumlah kursi yang diperoleh partai politik di parlemen sesuai dengan jumlah suara rakyat yang diperoleh dalam pemilihan umum. Sistem itu dipandang lebih demokratis dalam arti lebih *egaliter*, karena relatif tidak ada suara yang hilang (Arifin,2015:111).

Pemilihan umum sistem distrik yang merupakan sistem tertua, menunjuk kepada pertarungan antara kandidat yang dicalonkan oleh partai-partai politik dalam sebuah wilayah yang kecil (daerah pemilihan) untuk mencari satu wakil (*single-member constituency*). Kandidat dicalonkan oleh partai politik, rakyat yang sudah dewasa memilih nama dan gambar (foto) kandidat tersebut dan bukan memilih tanda gambar partai politik. Kandidat yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal (*the first past post*) dan akan mewakili daerah itu dalam parlemen. Suara kandidat yang kalah tidak diperhitungkan lagi, sehingga suaranya di anggap hilang (*wasted*). Namun, kandidat yang menang tidak lagi mewakili partainya, tetapi mewakili daerah pemilihan itu dan harus memperjuangkan kepentingan-kepentingannya. Hal itu dapat menimbulkan kemungkinan, anggota parlemen itu

lebih mementingkan distrik dan warganya daripada kepentingan nasional (Arifin,2015:111).

Kelemahan lain dari sistem distrik tersebut adalah kurang representatif karena partai politik yang calonnya kalah dalam suatu distrik kehilangan suara rakyat yang mendukungnya. Dengan demikian, terdapat sejumlah suara yang terbuang sia-sia karena tidak diperhitungkan sama sekali. Demikian juga sistem distrik itu kurang efektif dalam masyarakat plural, karena terbagi dalam kelompok etnis, religius, tribal, sehingga sistem itu mungkin hanya relevan diselenggarakan di negara yang memiliki satu kebudayaan nasional yang terpadu secara ideologis dan etnis (Arifin,2015:111).

Namun demikian, sistem distrik itu memiliki keuntungan terutama karena sederhana dan murah untuk diselenggarakan, karena suatu partai dapat lebih mudah mencapai kedudukan mayoritas dalam parlemen sehingga tidak perlu berkoalisi. Demikian juga karena kecilnya daerah kandidat yang “bertarung” itu dapat dikenal dengan baik oleh komunitasnya, sehingga hubungan kandidat yang terpilih dengan konstituennya akan lebih erat atau tidak terjadi kesenjangan (*disconnect electoral*) (Arifin,2015:112).

Jika sistem pemilihan umum menggunakan sistem gabungan antara sistem proporsional dan sistem distrik sebagaimana ditemukan diberbagai negara termasuk di Indonesia dalam pemilihan umum tahun 2004 dan 2009, maka cara dan model kampanye yang dipilih tentu dapat disesuaikan. Namun, penonjolan ketokohan dan visi, misi, dan program kandidat tetap harus menjadi perhatian utama dalam kampanye pemilihan umum (Arifin,2015:112).

2.4 Penelitian Yang Relevan

1. Veni Handayani (jurnal) Hubungan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik dalam pemberian suara pada Pilkada serentak tahun 2015 di Desa Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu. penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui hubungan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik dalam pemberian suara pada pilkada serentak tahun 2015. Latar belakang dari penelitian ini adalah pretasi partisipasi politik Kabupaten Mahakam Ulu pada pilkada serentak yang menempati predikat tertinggi sekalimantan Timur. Melihat fenomena masalah positif tersebut, maka penulis mencoba untuk menganalisis lebih dalam untuk melihat hubungan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik. penelitian ini dilaksanakan di Kampung Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu dengan sampel berjumlah 89 orang menggunakan metode probability sampling. Selanjutnya data penelitian diperoleh dengan cara observasi, penyebaran kuesioner, dokumentasi dan penelitian kepustakaan. Kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis chi square (kai kuadrat). Setelah digunakan rangkaian uji statistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jenis kelamin memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 0,001 terhadap partisipasi politik dalam pemberian suara di Kampung Mahakam Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakan Ulu, tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan sebesar 0,003 terhadap partisipasi politik dalam pemberian

suara di Kampung Mamahak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu

2. Hidayat Taufik (jurnal) Pengaruh Status Sosial Ekonomi Dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif (PILEG) Tahun 2014 Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Adapun penelitian ini membahas pengaruh status sosial ekonomi dan kesadaran politik masyarakat terhadap partisipasi politik pada pileg tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Karya ilmiah ini berargumentasi bahwa status sosial ekonomi dan kesadaran politik mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap partisipasi politik masyarakat pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 99 orang dari total populasi berjumlah 12.576 orang. Untuk pengumpulan dan dilakukan dengan cara menyebar kuesioner, wawancara dan observasi langsung kelapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan analisis statistik menggunakan rumus korelasi product momen, analisis regresi linier sederhana, regresi berganda dan dilanjutkan koefisien penentu dan koefisien determinasi, yang dibantu dengan bantuan komputer program SPSS versi 16.0. Adapun hasil penelitian ini, pertama terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara status sosial ekonomi terhadap partisipasi politik pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar, dengan korelasi 0,527. Kedua terdapat hubungan (korelasi) yang positif dan signifikan antara kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pemilihan legislatif (pileg) tahun 2014 di

Kelurahan Karang Anyar, dengan Korelasi 0,606. Ketiga, status sosial ekonomi dan kesadaran politik mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi masyarakat Kelurahan Karang Anyar pada Pileg tahun 2014. Keempat, besarnya pengaruh status sosial ekonomi dan kesadaran politik terhadap partisipasi politik pada pileg tahun 2014 di Kelurahan Karang Anyar adalah 39% dan sisanya 61% dipengaruhi oleh variabel-variabel atau faktor-faktor yang lain.

3. Aang Nofitra (jurnal) Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Politik Pada Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru Tahun 2014. Berdasarkan hasil penelitian yang mengenai “Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Partisipasi Politik Di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru”, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tingkat pendidikan dan partisipasi politik. Hal ini didasarkan pada hasil uji hipotesis Chi-square test diperoleh nilai signifikan sebesar $\chi^2(2, N = 100) = 2,216; P > 0,05$. Dalam kata lain dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan tinggi tidak menjamin partisipasi tinggi pula di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kecenderungan partisipasi politik yang dilakukan masyarakat Kecamatan Senapelan mampu mempengaruhi partisipasi, maka bisa diasumsikan bahwa masyarakat Kecamatan Senapelan masih mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan pola pikir yang tinggi dengan mengetahui berita yang aktual mengenai politik dan pemerintahan sehingga bila diasumsikan partisipasi politik yang dilakukan mereka tinggi.

4. Ayuni Nur Fatwa (jurnal) Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Adapun penelitian ini menggambarkan pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati Tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Karya ilmiah ini berargumentasi pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Penelitian ini dilaksanakan de Desa Sesuli Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengumpula data yang dilakukan dengan penelitian Kepustakaan, Observasi (pengamatan), Kuesioner (angket), dan penggunaan dokumentasi. Kuesioner disebarkan kepada 96 orang (responden) yang diambil dengan teknik random Sampling yaitu dengan mengambil secara acak 96 orang respoden. Data-data yang dikumpulkan dibandingkan dan dianalisis dengan analisis kuantitatif. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kesadaran politik terhadap partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Bupati tahun 2013 di Desa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan korelasi antara pengaruh kesadaran politik terhadap partisipai politik sebesar 0,236 dan hasil tes menunjukkan signifikasi. Ini berarti perubahan sebesar satu satuan dalam variabel kesadaran politik mengakibatkan perubahan sebesar 0,236 partisipasi politik. Dengan demikian maka hipotesis penelitian yang berbunyi “kesadaran politik berpengaruh positif dan signifikan terhadap partisipai politik” diterima.

Besarnya pengaruh variabel kesadaran politik terhadap partisipasi politik adalah sebesar 13,1% ini berarti ada faktor lain sebesar 86,9% yang mempengaruhi kesadaran Politik terhadap partisipasi politik masyarakat.

5. Ruphi Trias Krisna (Skripsi) Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana pengaruh tingkat pendidikan formal terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum kepala daerah langsung di Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo tahun 2015. Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian tingkat pendidikan masyarakat Kelurahan Tamanarum di dominasi oleh lulusan pendidikan tinggi atas kemudian disusul oleh lulusan pendidikan tinggi dan sisanya adalah lulusan pendidikan rendah, tingkat pendidikan yang tinggi merupakan modal bagi masyarakat untuk dapat berpartisipasi politik dengan landasan yang kuat. Partisipasi masyarakat di dalam pemilukada Ponorogo tahun 2015 di Kelurahan Tamanarum merupakan partisipasi yang tinggi. Partisipasi paling tinggi sesuai dengan hasil penelitian adalah partisipasi dalam melakukann pemilihan atau tahap pemungutan suara sedangkan partisipasi paling rendah adalah keikutsertaan masyarakat dalam menjadi anggota partai politik dan kampanye formal serta dalam melakukan diskusi formal dalam tahapan proses Pemilukada Ponorogo 2015. Berdasarkan data tabulasi silang yang telah dilakukan antara tingkat pendidikan formal terhadap

tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Tamanarum Ponorogo diketahui bahwa sebanyak 14 pemilih atau sebesar 20,6% memiliki partisipasi rendah. Jika dibandingkan dengan total lulusan sekolah dasar maka dalam hal ini sebesar 100% pemilih yang lulusan sekolah dasar memiliki partisipasi politik yang rendah. Dari 29 pemilih yang menamatkan pendidikannya pada sekolah menengah diketahui bahwa sebanyak 15 orang atau sebesar 22,1% memiliki partisipasi yang tinggi kemudian disusul partisipasi politik sedang atau rendah yang memiliki jumlah sama yaitu sebanyak 7 pemilih atau sebesar 10,3%. Untuk tingkat pendidikan perguruan tinggi diketahui sebanyak 18 pemilih atau sebesar 26,5% memiliki partisipasi politik tinggi dan sisanya memiliki partisipasi politik sedang sebanyak 7 pemilih atau sebesar 10,3%. Tetapi yang sangat penting adalah bahwa tidak ada satupun pemilih yang lulus perguruan tinggi memiliki partisipasi politik rendah.

6. Mahbub Hamdi Naufal, dkk. (jurnal) Pengaruh Sosialisasi Politik Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015. Penelitian ini dalam rangka penulisan skripsi ini dilakukan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh sosialisasi politik dan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dalam Pilkada serentak Tahun 2015. Latar belakang penelitian ini adalah kurangnya sosialisasi politik karena masalah partisipasi politik masyarakat yang masih kurang sehingga perlu diperhatikan di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser.

Hipotesis yang digunakan adalah terdapat pengaruh sosialisasi politik dan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dalam pilkada serentak tahun 2015. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser dengan sampel masyarakat dimaksud yang berjumlah 96 orang. Penelitian dilakukan dengan mengambil sebagian populasi yang ada untuk dapat dijadikan sebagai sampel. Selanjutnya, data penelitian diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner, kemudian dianalisis dengan menggunakan koefisien korelasi product moment, analisis korelasi persial, analisis regresi linier berganda, kecermatan prediksi dan analisis koefisien determinasi yang dibantu dengan bantuan komputer program SPSS versi 22.0. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel sosialisasi politik dan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik. Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara sosialisasi politik dan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik adalah sebesar 99,4% sedangkan 0,6% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk kedalam fokus penelitian ini. setelah digunakan rangkaian hasil uji statistik diperoleh hasil sosialisasi politik dan tingkat pendidikan terhadap partisipasi politik. hasil uji signifikansi diperoleh hasil t_{test} lebih besar dari pada nilai t_{tabel} , sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima.

2.5 Kerangka Berfikir

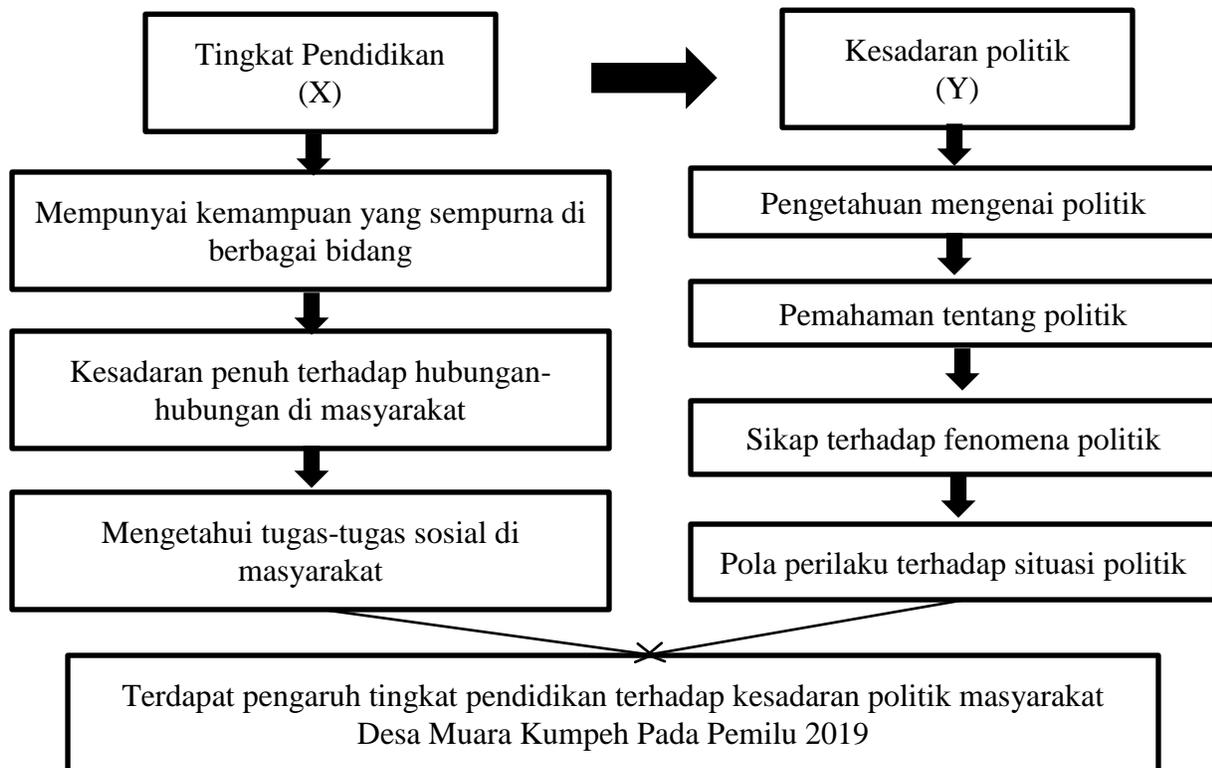
Bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, maka tidak terlepas dari partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintah, partisipasi yang dapat dilakukan yaitu dengan berpartisipasi dalam politik, partisipasi politik di pandang sangat penting karena dengan ada partisipasi politik masyarakat bisa ikut andil dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pengambilan keputusan pemerintah. Partisipasi politik tidak terlepas dari adanya kesadaran politik masyarakatnya

Kesadaran politik masyarakat sangat akan mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik untuk menentukan baik buruknya jalanya pemerintahan untuk kedepannya, partisipasi politik masyarakat yang sangat awam di jumpai di negara demokrasi yaitu pelaksanaan pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang dilaksanakan selama 5 tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden atau memilih DPR, DPD, maupun DPRD.

Melihat sangat pentingnya pengaruh kesadaran politik masyarakat dalam berpartisipasi politik untuk kesejahteraan masyarakat kedepannya, ternyata dalam pelaksanaanya di masyarakat tidak sedikit masyarakat yang tidak ikut atau pun tidak peduli terhadap hak yang dimikinya untuk berpartisipasi politik pemilu, salah satu penyebab tidak ikut sertanya masyarakat dalam pemilu adalah tingkat pendidikan yang rendah.

Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk dapat mengukur tingkat pendidikan adalah pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Kemudian indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur tingkat kesadaran politik masyarakat pada pemilu 2019 adalah menurut Soekanto (dalam

Hidayat, 2016 :566), pengetahuan politik, pemahaman politik, sikap terhadap politik dan pola perilaku (tindakan) mengenai politik. Sehingga dari teori yang telah di paparkan diatas, maka kerangka berfikir pada penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 kerangka berfikir

2.6 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan tinjauan teori yang telah di paparkan diatas, maka dapat ditentukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₀ : Tingkat pendidikan (X) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Politik (Y) masyarakat di Desa Muara Kumpeh dalam Pemilu 2019.

H_a : Tingkat pendidikan (X) berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Politik (Y) masyarakat di Desa Muara Kumpeh dalam Pemilu 2019.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif deskriptif, metode ini merupakan pengujian teori yang menggunakan instrumen (angket), mengolah data berdasarkan angka-angka atau penjumlahan untuk mengambil kesimpulan secara deduktif atau dari umum ke khusus dan di jabarkan dengan menggambarkan keadaan subjek saat itu, atau menggambarkan lapangan sebagaimana adanya. Kesimpulannya adalah membenarkan atau menolak teori (Sutja. Dkk., 2017:62-63). Dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif ini peneliti menggunakan angket sebagai instrumen penelitian untuk mengumpulkan data dilapangan secara langsung di masyarakat

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Muara Kumpeh Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muara Jambi dan waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan mulai pada bulan 08 s.d 18 Agustus 2019. Pemilihan tempat penelitian dikarenakan desa muara kumpeh memiliki partisipasi politik pada pemilu 2019 dengan persentase paling rendah di wilayah kecamatan kumpeh.

3.3 Populasi dan Sampel

3.3.1 Populasi

Dalam penelitian ini yang menjadi populasinya adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019 yaitu sebesar 1464 sesuai dari data KPU.

3.3.2 Sampel

Cara menentukan ukuran sampel yang dapat digunakan adalah rumus Solvin:

Rumus:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2} \left(n = \frac{1464}{1+1464(0.1)^2} \right)$$

$$n = 97$$

keterangan:

n = sampel

N = populasi

e = perkiraan tingkat kesalahan.

Berdasarkan rumus Solvin yang telah digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari jumlah populasi maka hasil yang didapat sejumlah 97 responden yang akan menjadi sampel peneliti. Nilai e = 10%.

3.4 Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *sampling purposive*. Menurut Sugiono (2012:68) *Sampling purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu atau kriteria-kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk mengambil subjek yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Muara Kumpeh yang terdaftar dalam data pemilih, kemudian masyarakat yang dijadikan responden pada penelitian ini adalah masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2019.

3.5 Data dan Sumber Data

Data adalah bahan mentah yang perlu diolah, sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kualitatif maupun kuantitatif, yang menunjukkan fakta. Kemudian data juga merupakan kumpulan fakta, angka, atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya, sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik suatu kesimpulan (Siregar, 2014:37).

Data dibedakan menjadi dua dengan cara memperolehnya. Dan dua jenis data dalam kelompok ini, yaitu

a) Data primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan, (Siregar, 2014:37). Sehingga dalam penelitian ini data primer di ambil dari masyarakat Desa Muara Kumpeh secara langsung melalui bantuan angket (kuesioner)

b) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengelolanya, (Siregar, 2014:37). Dalam penelitian ini, yang akan menjadi data sekundernya adalah data Tingkat Pendidikan yang diperoleh dari kantor Desa Muara Kumpeh dan data hasil partisipasi politik pada pemilu 2019 yang diperoleh dari KPU Muara Jambi.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu proses pengumpulan data primer dan data sekunder dalam sebuah penelitian, pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang penting, karena data yang dikumpulkan untuk digunakan dalam pemecahan

masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan (Siregar, 2014:39).

3.6.1 Teknik Kuesioner

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik Kuesioner (angket), kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama dalam organisasi, yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau sistem yang sudah ada (Siregar, 2014:44).

Dalam penelitian ini kuesioner (angket) yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer dari masyarakat Desa Muara Kumpeh. Angket yang digunakan menggunakan alat ukur dengan Skala Likert pada variabel tingkat pendidikan dan kesadaran politik. Skala Likert yang digunakan pada angket variabel kesadaran politik terdiri dari lima pilihan jawaban yaitu SS (Sangat Setuju), S (Setuju), RG (Ragu-ragu), KS (Kurang Setuju), dan TS (Tidak Setuju). Sedangkan untuk variabel tingkat pendidikan terdiri dari lima pilihan jawaban yaitu A,B,C,D, dan E. Skor dari kelima pilihan jawaban dari dua variabel tersebut terdiri dari nilai 5 sampai dengan 1, kemudian kuesioner tersebut di sebar ke pada masyarakat sesuai dengan jumlah sampel pada data tingkat pendidikan masyarakat Desa Muara Kumpeh.

Tabel 3.1 Skor Dari Setiap Pilihan Jawaban

Variabel	Pilihan Jawaban	Skor untuk setiap pernyataan
Kesadaran Politik	SS	5
	S	4
	RG	3
	KS	2
	TS	1
Tingkat Pendidikan	A	5
	B	4
	C	3
	D	2
	E	1

3.6.2 Teknik Dokumentasi

Kemudian untuk mengumpulkan data sekunder menggunakan teknik dokumentasi, teknik dokumentasi yaitu penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya berupa data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah, dan hal lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Kelebihan teknik dokumentasi ini adalah karena data tersedia, siap pakai, serta hemat biaya dan tenaga (Hikmat, 2014:83). Dokumentasi yang akan di peroleh penelitian ini adalah data dari kantor Desa Muara Kumpeh dan data hasil pemilu dari KPU.

3.7 Teknik Validasi Instrumen Penelitian

Menurut Sutja. dkk., (2017:79) dalam pengembangan instrumen baik tes maupun non-tes perlu jaminan bahwa instrumen itu valid dan reliabel. Valid artinya sesuai, cocok atau tepat. Sedangkan reliabel artinya konsisten, tetap atau ajeg. Sehingga perlu di lakukan uji validitas instrumen dan uji reliabilitas instrumen.

3.7.1 Uji Validitas Instrumen

Validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (Siregar, 2014:75). Dalam uji validitas data penulis menggunakan validitas kontruk.

Suatu instrumen dikatakan valid, bila:

- a. Koefisien korelasi produk moment melebihi 0,3
- b. Koefisien korelasi produk moment
 $> r - \text{tabel } (\alpha : n - 2)$ $n = \text{jumlah sampel}$
- c. Nilai $sig \leq \alpha$

Adapun rumus yang dapat digunakan untuk melakukan uji validitas konstruk dengan teknik korelasi *product moment* adalah sebagai berikut:

$$r_{hitung} = \frac{n (\Sigma XY) - (\Sigma X) (\Sigma Y)}{\sqrt{[n (\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2] [n (\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2]}}$$

Keterangan:

n = jumlah responden

X = skor variabel (jawaban responden)

Y = skor total dari variabel untuk reponden ke- n

Untuk mempermudah peneliti dalam menguji validitas instrumen, maka peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24.

Dari hasil uji validitas yang dilakukan penguji pada angket uji coba yang diterapkan dilapangan mendapatkan hasil bahwa untuk variabel X dari 17 pertanyaan terdapat 13 pertanyaan yang valid dan untuk variabel Y yang terdiri dari 30

pernyataan terdapat 25 pernyataan yang valid. Untuk pernyataan yang tidak valid tidak dapat digunakan untuk diterapkan didalam angket penelitian.

3.7.2 Uji Reliabilitas Instrumen

Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (*stability*), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. (Sugiono, 2016: 354). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *Alpha Cronbach*.

$$r_{11} = \left(\frac{k}{k-1} \right) \left(1 - \frac{\sum \sigma_b^2}{\sigma_t^2} \right)$$

Keterangan:

σ_t^2 = Variasi total

$\sum \sigma_b^2$ = jumlah varian butir

k = jumlah butir pertanyaan

r_{11} = koefisien reliabilitas instrumen

Kriteria suatu instrumen yang dapat dikatakan reliabel dengan menggunakan teknik ini, bila koefisien reliabilitas (r_{11}) > 0,6. Untuk mempermudah pengujian reliabilitas data, maka peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24.

Tabel 3.2 hasil pengujian reliabilitas angket variabel tingkat pendidikan

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.914	13

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,914 > 0,6$ maka angket variabel tingkat pendidikan dinyatakan Reliabel.

Tabel 3.3 hasil pengujian reliabilitas angket variabel kesadaran politik

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.981	25

Sumber: SPSS 24

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan hasil bahwa nilai *Cronbach's Alpha* sebesar $0,981 > 0,6$ maka angket variabel kesadaran politik dinyatakan reliabel.

3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis (Sugiono, 2017:147). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel sehingga teknik analisis data yang digunakan adalah uji regresi sederhana.

Sebelum dilakukan uji regresi sederhana, maka terlebih dahulu dilakukan uji prasyarat analisis seperti uji normalitas, uji homogenitas, dan uji linieritas.

3.8.1 Uji Prasyarat Analisis

3.8.1.1 Uji Normalitas

Tujuan dilakukannya uji normalitas terhadap serangkaian data adalah untuk mengetahui apakah populasi data berdistribusi normal atau tidak. Bila data

berdistribusi normal, maka dapat digunakan uji statistik berjenis parametrik. Sedangkan bila data tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik nonparametrik. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data (Siregar, 2014:153).

Selanjutnya metode yang dapat digunakan untuk menguji normalitas data, salah satunya dengan menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov*, prinsip kerja metode ini membandingkan frekuensi kumulatif distribusi teoritik dengan frekuensi kumulatif distribusi empirik (observasi) (Siregar, 2014:153). Uji normalitas dengan metode *Kolmogorov-Smirnov* dapat dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 24. Dengan kaidah pengujian jika nilai Probabilitas (sig) > 0,05 dengan taraf signifikan 5% ($\alpha = 0,05$) maka data berdistribusi normal.

Tabel 3.4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.95260092
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.065
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.136 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi (sig = 0,136) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha ($\alpha = 0,05$). dengan syarat pengujian yang diambil berdasarkan nilai probabilitasnya (sig), jika $\text{Sig} > 0,05$ maka H_0 diterima dan jika $\text{sig} < 0,05$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data dari variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal dengan nilai sig. $0,136 > 0,05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal.

3.8.1.2 Uji Homogenitas

Pengujian homogenitas bertujuan untuk mengetahui apakah objek (tiga sampel atau lebih) yang diteliti mempunyai varian yang sama. Uji homogenitas dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut:

$$F_{hitung} = \frac{\text{variabel terbesar}}{\text{variabel terkecil}}$$

Dengan kriteria pengujian sebagai berikut: Jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ berarti tidak homogen dan Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$ berarti homogen, dengan taraf signifikansi 5%.

Untuk mempermudah melakukan pengujian homogenitas data, maka dalam proses pengujian dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 24.

Tabel 3.5 Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances			
kesadaran politik			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.011	14	76	.001

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 3.5 dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 3,011, sesuai dengan kriteria pengujian, apabila $F_{hitung} (3,011) \leq F_{tabel} (3.94)$ maka varians-variens

tersebut adalah homogen. Kemudian untuk mencari $F_{tabel} = df$ pembilang = jumlah variabel $(k-1) = (2-1) = 1$ dan df penyebut = jumlah responden – jumlah variabel = $(97-2) = 95$ bahwa $F_{tabel} = 3.94$, maka dapat disimpulkan bahwa data tingkat pendidikan dan kesadaran politik mempunyai varian yang homogen.

3.8.1.3 Uji Linieritas

Uji linieritas memiliki tujuan mengetahui apakah data variabel tak bebas (Y) dan variabel bebas (X) memiliki hubungan linier. Uji ini biasanya digunakan sebagai prasyarat dalam penerapan model regresi linier. (Siregar, 2014:178). Untuk mempermudah melakukan uji linieritas data, maka dalam proses pengujian dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 24. Selanjutnya penggunaan model linieritas dikatakan tepat dan dapat digunakan apabila. Nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat hubungan yang linier (garis lurus).

Tabel 3.6 Uji Linieritas

ANOVA					
kesadaran politik					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	10523.317	20	526.166	8.056	.000
Within Groups	4963.569	76	65.310		
Total	15486.887	96			

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 3.6 di atas terlihat bahwa $F_{hitung} = 8,056$ sesuai dengan uji linieritas apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat hubungan yang linier (garis lurus). Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa nilai $F_{hitung} 8,056 > F_{tabel} 3,94$ yang berarti terdapat hubungan yang linier antara variabel tingkat pendidikan dan kesadaran politik.

3.8.2 Uji Hipotesis

Menurut Sutja. Dkk., (2017:49) hipotesis adalah jawaban sementara atau tebakan akan temuan penelitian. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat didesa Muara Kumpehh dalam Pemilu 2019. Untuk membuktikan kebenaran hipotesis di atas maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji regresi linier sederhana.

3.8.2.1 Uji Regresi Sederhana

Regresi linier merupakan salah satu alat yang digunakan dalam memprediksi permintaan di masa yang akan datang berdasarkan data masa lalu, atau untuk mengetahui pengaruh satu variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel tak bebas (*dependent*). Uji regresi sederhana di gunakan untuk mengetahui seberapa pengaruh variabel bebas terhadap variabel tak bebas, tujuan dari metode ini adalah untuk meramalkan atau memprediksi besaran nilai variabel *dependent* yang di pengaruhi oleh varibel *independent* (Siregar,2014: 379). Rumus yang di gunakan dalam regresi linier sederhana adalah:

$$Y = a + b \cdot X$$

Keterangan:

Y = variabel terikat

X = variabel bebas

a dan b = konstanta

Tabel 3.7 Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Politik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	32.639	2.502		13.046	.000
	tingkat pendidikan	.889	.087	.722	10.166	.000

a. Dependent Variable: kesadaran politik

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 4.19 didapatkan besarnya konstanta (a) = 32,639 dan diperoleh koefisien regresi (b) antara tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik sebesar 0,889 sehingga dimasukkan dalam persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 32,639 + 0,889 X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila tingkat pendidikan (X) meningkat 1 maka kesadaran politik (Y) akan meningkat 33,528. Jika tingkat pendidikan (X) memiliki nilai paling rendah atau mendekati nol maka taksiran kesadaran politik (Y) sebesar 32,639.

untuk mengetahui nilai regresi yang ditemukan tersebut dapat dipercaya maka diperlukan uji lanjutan dengan melakukan uji signifikansi melalui Uji t. Uji t inilah yang menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan:

t = nilai t_{hitung} yang dicari.

r = korelasi antar variabel.

n = jumlah subjek atau responden yang diolah.

Kriteria uji t ini adalah terima H_a atau adanya pengaruh X terhadap Y apabila hasil $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ pada taraf signifikan $\alpha = 5\%$. Untuk mempermudah peneliti dalam melakukan uji hipotesis, maka peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh $t_{tabel} = 1,98$ (nilai signifikan 5%) dan t_{hitung} peneliti peroleh dari tabel 4.19 sebesar 10,166 sehingga diketahui bahwa $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $10,166 \geq 1,98$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Muara Kumpeh dengan mengambil subyek penelitian yaitu masyarakat Desa Muara Kumpeh yang jumlah populasinya 3749 orang. Dalam penelitian teknik pengukuran sampel yang digunakan adalah rumus solvin dengan taraf kesalahan 10% sehingga berjumlah 97 responden dan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *probability sampling* dengan *proportionate stratified random sampling*. Teknik ini digunakan karena populasi mempunyai anggota/unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Stratanya di tentukan menurut tingkat pendidikan, seperti tamatan Pendidikan Dasar berjumlah 68 responden, Pendidikan Menengah 26 responden dan Pendidikan Tinggi berjumlah 3 responden

4.1 Tabel Data Responen

Kriteria		Jumlah responden	Total reponden
Gender	Laki-Laki	50	97
	Perempuan	47	
Usia	Tahun		97
	17 – 23	11	
	24 – 30	21	
	31 – 37	14	
	38 – 44	22	
	45 – 51	19	
	52 – 58	9	
	59 – 65	1	
66 – 73	0		

Dari data pada tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 50 responden dan jumlah responden perempuan sebanyak 47 responden dan total keseluruhan berjumlah 97 responden, dari jumlah total tersebut responden yang

ikut berpartisipasi memiliki usia yang berbeda-beda dari usia 17 tahun hingga 68 tahun, sebagaimana rinciannya sebagai berikut dari usia 17 – 23 tahun berjumlah 11 responden, usia 24 – 30 tahun berjumlah 21 responden, usia 31 – 37 tahun berjumlah 14 responden, usia 38 – 44 tahun berjumlah 22 responden, usia 45 – 51 tahun berjumlah 19 responden, usia 52 – 58 tahun berjumlah 9 responden, usia 59 – 65 tahun berjumlah 1 responden, dan usia 67 – 73 tahun berjumlah 0 responden dengan total keseluruhan berjumlah 97 responden.

Sebelum dilaksanakan penelitian untuk pengambilan data sekunder dengan menggunakan angket, terlebih dahulu angket diuji coba pada masyarakat Desa Muara Kumpeh dengan jumlah 30 responden yang kemudian diuji validitasnya dengan menggunakan rumus product moment person dan di uji reliabilitasnya dengan rumus Alpha. Setelah di ketahui validitas dan reliabilitasnya maka angket tersebut dapat digunakan untuk melaksanakan penelitian pada responden dengan jumlah sesuai dengan tingkat pendidikan yang telah di jabarkan diatas.

4.2 Deskripsi Data Variabel Tingkat Pendidikan (X)

Tabel 4.2 Deskripsi Statistik Variabel Tingkat Pendidikan (X)

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
tingkat pendidikan	97	46.00	15.00	61.00	2591.00	26.7113	10.31479	106.395
Valid N (listwise)	97							

Sumber : Output SPSS 24

Untuk melakukan analisis data variabel tingkat pendidikan (X) peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24. Berdasarkan hasil deskripsi statistik variabel

tingkat pendidikan (X) pada tabel 4.2 diatas didapat bahwa terdapat 97 responden yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 26,71; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 10,314; skor minimum yaitu 15; skor maximum yaitu 61; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 2591.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori variabel tingkat pendidikan dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.3 Kategori Skor Variabel Tingkat Pendidikan (X)

No	Interval	F	%	Kategori
1	53 - 65	2	2%	Sangat Tinggi
2	40 - 52	10	10%	Tinggi
3	27 - 39	31	32%	Sedang
4	14 - 26	54	56%	Rendah
5	1 - 13	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		97	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (mean) variabel tingkat pendidikan sebesar 26,71 yang berada pada skala 14 – 26 dengan jumlah frekuensi 54 dan persentase sebesar 56% sehingga sebagian besar tingkat pendidikan masyarakat berada dalam kategori rendah.

4.3 Deskripsi Data Variabel Kesadaran Politik (Y)

Untuk melakukan analisis data variabel kesadaran politik peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan peneliti, maka diperoleh skor minimum 40 dan skor maximum 93. Hasil perhitungan distribusi skor tersebut menghasilkan skor rata-rata sebesar 56,38 dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 5469. Hal tersebut dapat dilihat dari tabel 4.4 Sebagai berikut:

Tabel 4.4 Deskripsi Statistik Variabel Kesadaran Politik

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
kesadaran politik	97	53.00	40.00	93.00	5469.00	50.3814	12.70125	161.322
Valid N (listwise)	97							

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori variabel kesadaran politik dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.5 Kategori Skor Variabel Kesadaran Politik (Y)

No	Interval	F	%	Kategori
1	101 - 125	0	0	Sangat Tinggi
2	76 - 100	9	9%	Tinggi
3	51 - 75	29	30%	Sedang
4	26 - 50	59	61%	Rendah
5	1 - 25	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		97	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (mean) variabel kesadaran politik sebesar 50,38 yang berada pada skala 26 – 50 dengan jumlah frekuensi 59 dan persentase sebesar 61% sehingga sebagian besar kesadaran politik masyarakat berada dalam kategori rendah.

A. Deskripsi data pengetahuan mengenai politik

Tabel Deskripsi Statistik pengetahuan mengenai politik

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimum	Maximum	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Pengetahuan politik	97	15	4	19	900	8.28	3.262	10.640
Valid N (listwise)	97							

Berdasarkan hasil deskripsi statistik tingkat pendidikan dasar pada tabel diatas didapat bahwa terdapat 97 responden yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 10,38; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 3,569; skor minimum yaitu 6; skor maximum yaitu 21; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 1104.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan indikator pemahaman mengenai politik, dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No	Interval	F	%	Kategori
1	21 - 25	3	3	Sangat Tinggi
2	16 - 20	11	11%	Tinggi
3	11 - 15	32	33%	Sedang
4	6 - 10	51	53%	Rendah
5	1 - 5	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		97	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (*mean*) variabel kesadaran politik sebesar 10,38 yang berada pada skala 6 – 10 dengan jumlah frekuensi 51 dan persentase sebesar 53% sehingga sebgaiian besar pemahaman mengenai politik masyarakat berada dalam kategori rendah.

C. Deskripsi data sikap terhadap fenomena politik

Tabel Deskripsi Statistik sikap terhadap fenomena politik

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimu m	Maximu m	Sum	Mean	Std. Deviation	Varianc e
sikap terhadap politik	97	26	12	38	1922	18.81	6.097	37.174
Valid N (listwise)	97							

Berdasarkan hasil deskripsi statistik tingkat pendidikan dasar pada tabel diatas didapat bahwa terdapat 97 responden yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 18,81; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 6,097; skor minimum yaitu 12; skor maximum yaitu 38; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 1922.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan indikator sikap terhadap fenomena politik, dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No	Interval	F	%	Kategori
1	37 - 45	1	1%	Sangat Tinggi
2	28 - 36	14	13%	Tinggi
3	19 - 27	25	27%	Sedang
4	10 - 18	57	59%	Rendah
5	1 - 9	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		97	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (*mean*) variabel kesadaran politik sebesar 10,38 yang berada pada skala 10 – 18 dengan jumlah frekuensi 57 dan persentase sebesar 59% sehingga sebgaiian besar sikap terhadap fenomena politik masyarakat berada dalam kategori rendah.

D. Deskripsi data pola perilaku terhadap situasi politik

Tabel Deskripsi Statistik pola perilaku terhadap situasi politik

Descriptive Statistics								
	N	Range	Minimu m	Maximu m	Sum	Mean	Std. Deviation	Varianc e
pola prilaku terhadap politik	97	20	7	27	1543	14.91	3.241	10.502
Valid N (listwise)	97							

Berdasarkan hasil deskripsi statistik tingkat pendidikan dasar pada tabel diatas didapat bahwa terdapat 97 responden yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 14,91; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 3,241; skor minimum yaitu 7; skor maximum yaitu 27; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 1543.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan indikator pola perilaku terhadap situasi politik, dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

No	Interval	F	%	Kategori
1	29 - 35	0	0	Sangat Tinggi
2	22 - 28	4	4%	Tinggi
3	15 - 21	30	31%	Sedang
4	8 - 14	62	64%	Rendah
5	1 - 7	1	1%	Sangat Rendah
Jumlah		97	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (*mean*) variabel kesadaran politik sebesar 14,91 yang berada pada skala 8 – 14 dengan jumlah frekuensi 51 dan persentase sebesar 64% sehingga sebgaiian besar pola perilaku terhadap situasi politik masyarakat berada dalam kategori rendah.

Kemudian untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan responden, dapat dilihat berdasarkan penjelasan berikut:

Tabel 4.6 Deskripsi Statistik Berdasarkan Pendidikan Dasar

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
pendidikan dasar	68	39.00	40.00	79.00	3423.00	50.3382	7.63263	58.257
Valid N (listwise)	68							

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan hasil deskripsi statistik tingkat pendidikan dasar pada tabel 4.6 diatas didapat bahwa terdapat 68 responden yang berlatar belakang pendidikan dasar yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 50,33; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 7,632; skor minimum yaitu 40; skor maximum yaitu 79; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 3423.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu pendidikan dasar, dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.7 Kategori Skor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Dasar

No	Interval	F	%	Kategori
1	101 - 125	0	0	Sangat Tinggi
2	76 - 100	2	3%	Tinggi
3	51 - 75	7	10%	Sedang
4	26 - 50	59	87%	Rendah
5	1 - 25	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		68	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (mean) tamatan pendidikan dasar sebesar 50,33 yang berada pada skala 26 – 50 dengan jumlah frekuensi 59 dan persentase sebesar 87% sehingga sebagian besar kesadaran politik masyarakat tamatan pendidikan dasar berada dalam kategori rendah.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan masyarakat yang memiliki tamatan tingkat pendidikan dasar yaitu Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.8 Deskripsi Statistik Berdasarkan Tamatan Sekolah Dasar (SD)

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
sd	34	26.00	44.00	70.00	1697.00	49.9118	5.88459	34.628
Valid N (listwise)	34							

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan hasil deskripsi statistik berdasarkan tamatan Sekolah Dasar (SD) pada tabel 4.8 diatas didapat bahwa terdapat 34 responden yang berlatar belakang pendidikan tamatan Sekolah Dasar (SD) yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 49,91; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 5,88; skor minimum yaitu 44; skor maximum yaitu 70; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 1697.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu tamatan Sekolah Dasar (SD), dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.9 Kategori Skor Berdasarkan Tamatan Sekolah Dasar (SD)

No	Interval	F	%	Kategori
1	101 - 125	0	0	Sangat Tinggi
2	76 - 100	0	0	Tinggi
3	51 - 75	4	12%	Sedang
4	26 - 50	30	88%	Rendah
5	1 - 25	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		34	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (mean) tamatan Sekolah dasar (SD) sebesar 49,91 yang berada pada skala 26 – 50 dengan jumlah frekuensi 30 dan persentase sebesar 88% sehingga sebgaiian besar kesadaran politik masyarakat tamatan Sekolah Dasar (SD) berada dalam kategori rendah.

Tabel 4.10 Deskripsi statistik Berdasarkan Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
smp	34	39.00	40.00	79.00	1726.00	50.7647	9.12558	83.276
Valid N (listwise)	34							

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan hasil deskripsi statistik berdasarkan tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) pada tabel 4.10 diatas didapat bahwa terdapat 34 responden yang berlatar belakang pendidikan tamatan Sekolah Menengah Pertama yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 50,76; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 9,12; skor minimum yaitu 40; skor maximum yaitu 79; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 1726.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP), dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.11 Kategori Skor Berdasarkan Tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Interval	F	%	Kategori
1	101 - 125	0	0	Sangat Tinggi
2	76 - 100	2	6%	Tinggi
3	51 - 75	3	9%	Sedang
4	26 - 50	29	85%	Rendah
5	1 - 25	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		34	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (mean) Tamatan Sekolah Menengah Pertama sebesar 50,76 yang berada pada skala 26 – 50 dengan jumlah frekuensi 29 dan persentase sebesar 85% sehingga sebagian besar kesadaran politik masyarakat tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) berada dalam kategori rendah.

Tabel 4.12 Deskripsi statistik Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menengah

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
pendidikan menengah	26	33.00	53.00	86.00	1770.00	68.0769	8.33270	69.434
Valid N (listwise)	26							

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan hasil deskripsi statistik berdasarkan tingkat pendidikan menengah pada tabel 4.12 diatas didapat bahwa terdapat 26 responden yang berlatar belakang pendidikan menengah yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 68,07; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 8,33; skor minimum yaitu 53; skor maximum yaitu 86; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 1770.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu pendidikan menengah, dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.13 Kategori Skor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Menengah

No	Interval	F	%	Kategori
1	101 - 125	0	0	Sangat Tinggi
2	76 - 100	4	15%	Tinggi
3	51 - 75	22	85%	Sedang
4	26 - 50	0	0	Rendah
5	1 - 25	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		26	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (mean) Tamatan pendidikan menengah sebesar 68,07 yang berada pada skala 51 – 75 dengan jumlah frekuensi 22 dan persentase sebesar 85% sehingga sebgaiian besar kesadaran politik masyarakat tamatan pendidikan menengah berada dalam kategori sedang.

Tabel 4.14 Deskripsi statistik Berdasarkan Pendidikan Tinggi

Descriptive Statistics								
	N	Range	Min	Max	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
pendidikan tinggi	3	2.00	91.00	93.00	276.00	92.0000	1.00000	1.000
Valid N (listwise)	3							

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan hasil deskripsi statistik berdasarkan tingkat pendidikan tinggi pada tabel 4.14 diatas didapat bahwa terdapat 3 responden yang berlatar belakang pendidikan tinggi yang mengisi angket dengan rata-rata (*mean*) sebesar 92,00; simpangan baku (*standar deviasi*) sebesar 1,000; skor minimum yaitu 91; skor maximum yaitu 93; dan jumlah skor keseluruhan adalah sebesar 276.

Untuk melihat tinggi rendahnya kategori kesadaran politik masyarakat berdasarkan masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan terakhir yaitu pendidikan tinggi, dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 4.15 Kategori Skor Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tinggi

No	Interval	F	%	Kategori
1	101 - 125	0	0	Sangat Tinggi
2	76 - 100	3	100%	Tinggi
3	51 - 75	0	0	Sedang
4	26 - 50	0	0	Rendah
5	1 - 25	0	0	Sangat Rendah
Jumlah		3	100 %	

Sumber: Hasil Pengolahan Data

Berdasarkan tabel diatas terlihat nilai rata-rata (mean) tamatan Pendidikan Tinggi sebesar 92,00 yang berada pada skala 76 – 100 dengan jumlah frekuensi 3 dan persentase sebesar 100% sehingga sebgaaian besar kesadaran politik masyarakat tamatan pendidikan tinggi berada dalam kategori tinggi.

4.4 Uji Prasyarat Analisis

4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas memiliki tujuan untuk mengetahui normal atau tidak data yang peneliti peroleh, dalam hal ini peneliti menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan bantuan SPSS 24. Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa data tersebut normal. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.16 sebagai berikut:

Tabel 4.16 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	8.95260092
Most Extreme Differences	Absolute	.080
	Positive	.080
	Negative	-.065
Test Statistic		.080
Asymp. Sig. (2-tailed)		.136 ^c

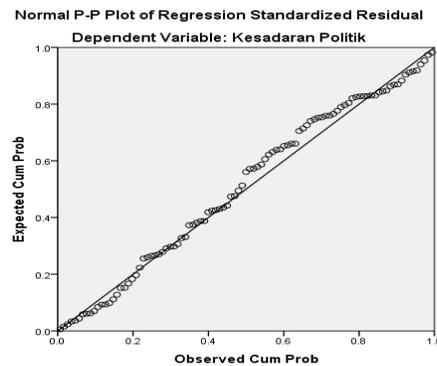
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa signifikansi ($\text{sig} = 0,136$) lebih besar jika dibandingkan dengan alpha ($\alpha = 0.05$). dengan syarat pengujian yang diambil berdasarkan nilai probabilitasnya (sig), jika $\text{Sig} > 0.05$ maka H_a diterima dan jika $\text{sig} < 0.05$ maka H_0 ditolak. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa data dari varaibel dalam penelitian ini berdistribusi normal dengan nilai $\text{sig} .0,136 > 0.05$ maka data dinyatakan berdistribusi normal. Selanjutnya data normalitas tersebut dapat dilihat pada gambar 4.1 P.P Plot berikut ini:



Sumber : Aplikasi SPSS 24

Gambar 4.1 Uji normalitas

4.4.2 Uji Homogenitas

Uji Homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi sama atau memiliki varian yang sama. Dalam penelitian ini uji homogenitas dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS 24 yang hasilnya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17 Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

kesadaran politik

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
3.011	14	76	.001

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 4.17 dapat diketahui bahwa F_{hitung} sebesar 3,011, sesuai dengan kriteria pengujian, apabila $F_{hitung} (3,011) \leq F_{tabel} (3,94)$ maka varians-variens tersebut adalah homogen. Kemudian untuk mencari F_{tabel} = df pembilang = jumlah variabel (k-1) = (2-1) = 1 dan df penyebut = jumlah responden – jumlah variabel = (97-2) = 95 bahwa $F_{tabel} = 3,94$, maka dapat disimpulkan bahwa data tingkat pendidikan dan kesadaran politik mempunyai varian yang homogen.

4.4.3 Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk mengetahui apakah kedua variabel tersebut memiliki hubungan yang linier (garis lurus) maka perlu dilakukan uji linieritas terlebih dahulu. Untuk menguji linieritas data yang di peroleh peneliti maka peneliti menggunakan bantuan aplikasi SPSS 24, yang hasilnya pada tabel berikut

Tabel 4.18 Uji Linieritas

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	8069.620	1	8069.620	103.355	.000 ^b
	Residual	7417.266	95	78.076		
	Total	15486.887	96			

a. Dependent Variable: kesadaran politik

b. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 4.18 di atas terlihat bahwa $F_{hitung}=103,355$. sesuai dengan uji linieritas apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka terdapat hubungan yang linier (garis lurus). Dari tabel diatas terlihat jelas bahwa nilai $F_{hitung} 103,355 > F_{tabel} 3,94$ yang berarti terdapat hubungan yang linier antara variabel tingkat pendidikan dan kesadaran politik.

4.5 Uji Hipotesis

Dalam penelitian ini hipotesis yang diajukan adalah terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh dalam Pemilu 2019. Untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan (X) terhadap kesadaran politik (Y) maka peneliti menggunakan analisis regresi linier sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS 24, dengan kaidah pengujian hipotesis sebagai berikut:

Ha = Terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat pada pemilu 2019

Ho = Tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat pada pemilu 2019

Untuk mengetahui apakah variabel tingkat pendidikan bersifat prediktif/tidak, maka peneliti melakukan analisis regresi sederhana dengan bantuan aplikasi SPSS 24, dari hasil analisis diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.19 Koefisien Regresi Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Politik

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	32.639	2.502		13.046	.000
	tingkat pendidikan	.889	.087	.722	10.166	.000

a. Dependent Variable: kesadaran politik

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 4.19 didapatkan besarnya konstanta (a) = 32,639 dan diperoleh koefisien regresi (b) antara tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik sebesar 0,889 sehingga dimasukkan dalam persamaan regresi sederhana sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

$$Y = 32,639 + 0,889 X$$

Persamaan tersebut menunjukkan bahwa apabila tingkat pendidikan (X) meningkat 1 maka kesadaran politik (Y) akan meningkat 33,528. Jika tingkat pendidikan (X) memiliki nilai paling rendah atau mendekati nol maka taksiran kesadaran politik (Y) sebesar 32,639. Selanjutnya melakukan pengujian dengan Uji-t

dengan kaidah pengujian jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ berarti terdapat pengaruh yang signifikan, sebaliknya $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ berarti tidak berpengaruh yang signifikan.

Dalam penelitian ini peneliti memperoleh $t_{tabel} = 1,98$ (nilai signifikan 5%) dan t_{hitung} peneliti peroleh dari tabel 4.19 sebesar 10,166 sehingga diketahui bahwa $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ atau $10,166 \geq 1,98$. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik.

Tabel 4.20 Koefisien Determinan Tingkat Pendidikan Terhadap Kesadaran Politik

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.722 ^a	.521	.516	8.83609

a. Predictors: (Constant), tingkat pendidikan

b. Dependent Variable: kesadaran politik

Sumber : Aplikasi SPSS 24

Dari tabel 4.20 terlihat bahwa besaran korelasi tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik diperoleh nilai $r^2 = 0,722^2$ menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan kesadaran politik yang positif. Sedangkan r square sebesar $0,521 \times 100\%$ memberi pengertian bahwa kesadaran politik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat sebesar 52,1% sedangkan sisanya ($100\% - 52,1\% = 47,9\%$) merupakan kontribusi variabel yang lain.

4.6 Pembahasan Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk meneliti tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh pada pemilu 2019. Tingkat pendidikan adalah proses belajar seseorang dalam tempat pendidikan yang

dilakukan secara berjenjang dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Hal ini sejalan dengan pendapat Saidah (2016:210), tingkat pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan seseorang dalam menjalankan pengalaman belajar untuk mempersiapkan individu agar dapat memainkan perannya didalam masyarakat yang di laksanakan secara berjenjang dalam pendidikan formal seperti pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang di tempuh masyarakat akan mempengaruhi salah satunya yaitu kesadaran politik masyarakat itu sendiri.

Kesadaran politik adalah sesuatu yang di rasakan seseorang dalam dunia politik yang mencakup pengetahuan, pemahaman, minat dan perhatian seseorang pada politik. hal ini sejalan dengan menurut Surbakti (2010 :184) kesadaran politik ialah kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup. Kemudian ditambahkan menurut Petter (dalam Hidayat, 2016:565), kesadaran politik adalah berbagai bentuk pengetahuan, orientasi, nilai-nilai yang berbentuk wawasan politik individu, ditinjau dari keterkaitannya dengan kekuasaan politik.

Kemudian menurut G Almont (1984:70) menyatakan tingkat pendidikan berkaitan erat dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik individu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan peneliti adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik masyarakat Desa Muara Kumpeh pada pemilu 2019.

Adapun besaran pengaruh antar variabel secara analisis tingkat pendidikan masyarakat terhadap kesadaran politik masyarakat sebesar 52,1% sedangkan sisanya sebesar 47,9% merupakan kontribusi variabel yang lain dan pengaruh tersebut pengaruh yang signifikan antara tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik.

Kesadaran politik terdiri dari 4 indikator yaitu, pengetahuan mengenai politik, pemahaman terhadap politik, sikap terhadap fenomena politik, dan pola perilaku terhadap situasi politik. Dari hasil penelitian persentase paling besar dari 4 indikator tersebut yaitu pola perilaku sebesar 64% yang menunjukkan bahwa kesadaran politik masyarakat muara kumpeh lebih didominasi oleh pola perilaku masyarakat terhadap situasi politik yang terjadi pada saat itu, kemudian persentase nomor 2 terbesar pada variabel kesadaran politik yaitu indikator sikap terhadap fenomena politik yang memiliki persentase sebesar 59%, di sini terlihat bahwa sikap terhadap politik di masyarakat termasuk lebih dominan dari indikator yang lain, kemudian indikator pemahaman mengenai politik mendapatkan persentase sebesar 53%, disini terlihat bahwa pemahaman mengenai politik masyarakat masih kurang dibandingkan indikator lain, dikarenakan masih kurangnya masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, dan indikator yang terakhir yaitu pengetahuan terhadap politik termasuk sangat rendah dari pada indikator yang lain yang hanya mencapai 37% saja. Hal ini sesuai dengan tingginya tamatan pendidikan dasar dan yang tidak sekolah mencapai 70% dan rendahnya tamatan pendidikan tinggi yang hanya mencapai 3% saja. Hal ini berdampak akan membuat masyarakat tergolong rendah akan pengetahuan mengenai politik di masyarakat. Dari fenomena yang didapatkan peneliti ini menunjukkan masyarakat lebih dominan akan pola perilaku dan sikap

terhadap politik di bandingkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai politik yang terjadi di masyarakat.

Dari hasil analisis data yang didapat, terdapat tamatan pendidikan dasar yang terdiri dari tamatan SD dan SMP memiliki kesadaran politik yang pada kategori rendah, tamatan pendidikan menengah memiliki kesadaran politik yang dalam kategori sedang dan untuk tamatan pendidikan tinggi kesadaran politiknya masuk kedalam kategori tinggi. Hasil analisis data penelitian ini sejalan dengan menurut pendapat G Almont (1984:70) yang menyatakan tingkat pendidikan berkaitan erat dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik individu, sehingga semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin tinggi kesadaran politiknya. Demikian juga sebaliknya, makin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kesadaran politiknya.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Tingkat pendidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang secara sadar dalam menjalani pendidikan yang di tempuh dari pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi untuk mempersiapkan diri menjadi yang lebih baik guna memainkan peran di masyarakat. Kesadaran politik adalah suatu perilaku masyarakat yang memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secabagai warga negara di bidang politik dan memiliki pengetahuan, pemahaman, pola perilaku dan tindakan terhadap penomena politik di masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah di jabarkan, maka dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi pula kesadaran politik masyarakat terutama pada pemilu 2019. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan (X) terhadap kesadaran politik (Y) dalam pemilu 2019.

Adapun pengaruh yang positif dan signifikan antara tingkat pendidikan (X) terhadap kesadaran politik (Y) masyarakat pada pemilu 2019 tersebut dapat diketahui pada uji koefisien determinasi tingkat pendidikan terhadap kesadaran politik diperoleh nilai $r^2 = 0,7222^2$ menunjukkan bahwa terdapat hubungan (korelasi) antara tingkat pendidikan dengan kesadaran politik yang positif. Sedangkan r square sebesar $0,521 \times 100\%$ memberi pengertian bahwa kesadaran politik dipengaruhi oleh tingkat pendidikan sebesar 52,1% sedangkan sisanya ($100\% - 52,1\% = 47,9\%$) merupakan kontribusi variabel yang lain.

5.2 Implikasi

Variabel tingkat pendidikan (X) terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel kesadaran politik (Y). karena koefisien regresi bernilai positif ($b = 33,528$). Ini memberikan pengertian bahwa variabel tingkat pendidikan (X) terbukti memberikan pengaruh yang positif terhadap variabel kesadaran politik (Y). Hal ini sesuai dengan pendapat G Almont (1984:70) menyatakan tingkat pendidikan berkaitan erat dan sangat berpengaruh terhadap kesadaran politik individu, sehingga semakin tinggi pendidikan masyarakat, semakin tinggi kesadaran politiknya. Demikian juga sebaliknya, makin rendah tingkat pendidikan masyarakat maka semakin rendah pula tingkat kesadaran politiknya

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang penulis sarankan antara lain sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Muara Kumpeh tingkat pendidikan harus menjadi sesuatu hal yang di prioritaskan untuk bisa terus melanjutkan pendidikan hingga pendidikan tinggi agar menjadi pribadi yang lebih baik dan salah satunya memiliki kesadaran politik yang baik dari segi pengetahuan, pemahaman, kesadaran dan perilaku berpolitik yang baik dan itu diperoleh salah satunya yaitu dari pendidikan itu sendiri.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu memfokuskan atau mengambang penelitiannya tentang variabel lain seperti perbedaan gender, usia, status sosial ekonomi dan lain-lain di masyarakat yang mempengaruhi kesadaran politik yang belum termasuk atau tercantum dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, A Gabriel. 1984. *Budaya politik “tingkah laku politik dan demokrasi di lima negara”*. Jakarta: PT BIMA AKSARA
- Arifin, Anwar. 2015. *Perspektif ilmu politik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Budiardjo, Miriam. 2013. *Dasar-dasar ilmu politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Fatwa Nur Ayuni. 2016. *Pengaruh Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2013 Didesa Sesulu Kabupaten Penajam Paser Utama*. Jurnal Ilmu pemerintahan Vol. 4 No. 4 Tahun 2016.
- Handayani, Veni. 2017. *Hubungan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik dalam pemberian suara pada pilkada serentak tahun 2015 di Desa Mamak Besar Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu*. Jurnal Pemerintahan Integratif Vol. 5 No. 4 Tahun 2017.
- Hidayat, Taufik. 2016. *Pengaruh Status Sosial Ekonomi Dan Kesadaran Politik Terhadap Partisipasi Politik Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) Tahun 2014 Dikelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda*. Jurnal Pemerintah Integratif. Vol. 4 No. 4 Tahun 2016.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *Metode Penelitian “Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi Dan Sastra”*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Martha I Nengah. 2014. *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Mahbub Hamdi Naufal, dkk. *Pengaruh Sosialisasi Politik Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Desa Mendik Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015*. Jurnal Pemerintahan Integratif Vol. 6 No. 3 Tahun 2018
- Nofitra, Aang. 2016. *Hubungan tingkat pendidikan dengan partisipasi politik pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru tahun 2014*. Jurnal FISIP Vol. 3 No. 2 Tahun 2016.
- Rahman. 2013. *Sistem Politik Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ruphi Trias Krisna. 2017. *Pengaruh Tingkat Pendidikan Formal Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Langsung Di*

Kelurahan Tamanarum Kabupaten Ponorogo Tahun 2015. Skripsi Ilmu Pemerintahan Tahun 2017.

Ruslan, Utsman Abdul Muis. 2000. *Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin*. Solo: Era Intermedia.

Saidah. 2016. *Pengantar Pendidikan “telaah pendidikan secara global dan nasional*. Jakarta: Rajawali Pers.

Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku politik*. Semarang: IKIP Semarang Press.

Siregar, Syoffian. 2014. *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group

Sutja. Dkk., 2017. *Penulisan Skripsi Untuk Prodi Bimbingan Konseling*. Yogyakarta: Writing Revolution.

Sugiono. 2016. *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta.

———. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Grasindo.

Tirtarahardja umar dan Sulo. 2005. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.

Triwiyanto, Teguh. 2014. *Pengantar pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.